

Analisis Keuangan Taman Nasional di Indonesia:

**Pendekatan Inovatif Penggalangan
Dana Tambahan Konservasi dan Ide Penerapan
Desentralisasi Sistem Pembiayaan
Taman Nasional**

Oleh:
Elfian Effendi
NRM/EPIQ Conservation Finance Specialist

Jakarta, 25 Juli 2001

Beberapa Pertimbangan Penting Perlunya Peningkatan Pendanaan

- Luas kawasan konservasi di Indonesia mencapai 23 juta hektar dengan 387 lokasi yang tersebar di seluruh penjuru tanah air
- 65,6 persen dari kawasan konservasi adalah taman nasional dengan 40 lokasi.
- UU 22/99 dan UU 25/99 mengenai Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah berpotensi untuk meningkatkan tekanan, gangguan, dan ancaman terhadap taman nasional.
- Dephutbun, terutama DitJen PKA, perlu mengeksplorasi diversifikasi sumber pembiayaan taman nasional
- Sumber APBN semakin sulit untuk dijadikan satu-satunya harapan utama pembiayaan taman nasional

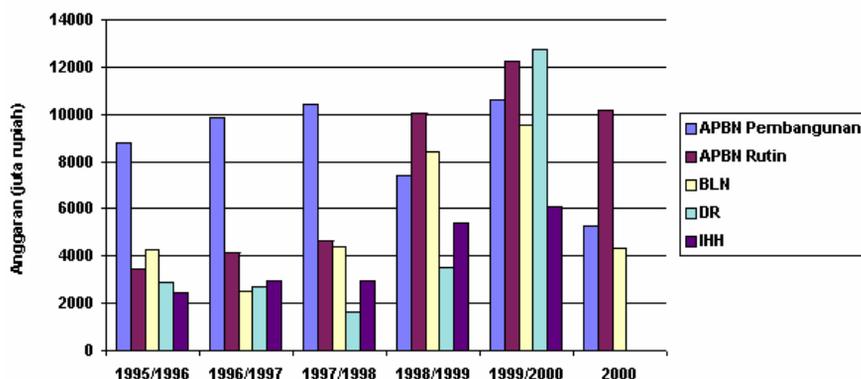
Profil Keuangan Taman Nasional Indonesia

- Selama 95/96-99/00, anggaran taman nasional masih dapat dikatakan tumbuh relatif stabil.
- Pos anggaran APBN Rutin tumbuh cukup berarti selama 98/99-99/00. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan pembiayaan rutin.
- Pos APBN Pembangunan tumbuh secara stabil selama 95/96-99/00. Kontribusi dari pos anggaran ini menurun 40 persen pada 98/99 akibat krisis ekonomi.
- Untuk tahun dinas 2000 (selama 9 bulan), pos APBN Pembangunan mengalami penurunan sebesar 69 persen; dari Rp 781,5 juta menjadi Rp 462 juta per bulan.

Continued

- Pos Bantuan Luar Negeri (BLN) mengalami peningkatan cukup berarti selama 95/96-99/00. Namun, kontribusi BLN tersebut hanya terfokus untuk beberapa taman nasional saja.
- Pos Dana Reboisasi (DR) tumbuh cukup stabil selama 95/96-99/00. Kontribusi DR meningkat cukup signifikan pada 99/00 yang mencapai Rp 12,7 milyar.
- Pos Iuran Hasil Hutan/Provisi Sumberdaya Hutan (IHH/PSDH) tumbuh cukup stabil selama 95/96-99/00 dengan kontribusi tertinggi pada 99/00 yang mencapai Rp 6 milyar.

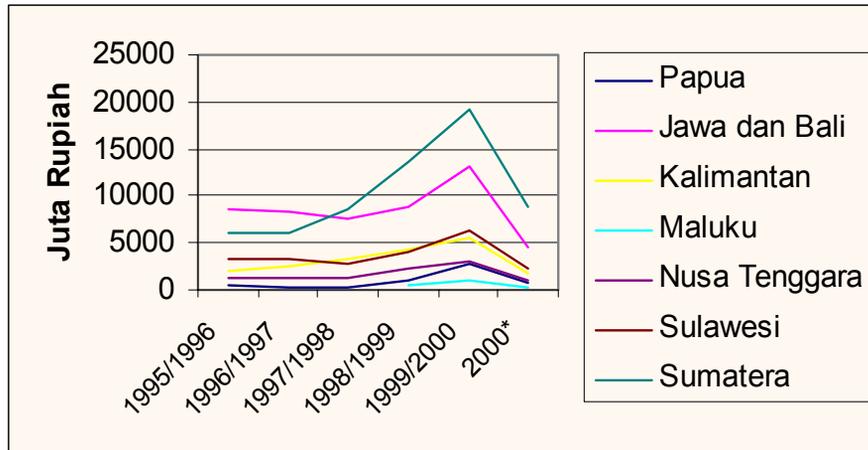
Alokasi Anggaran Taman Nasional 1995/1996-2000



Alokasi Anggaran Antar Kawasan

- Pengalokasian anggaran taman nasional di pulau Jawa dan Sumatera mendapat porsi yang lebih besar daripada taman nasional di kawasan Indonesia Bagian Timur.
- Selama 95/96-99/00, taman nasional yang berada di pulau Jawa dan Bali dengan total areal 593.280 hektar menyerap rata-rata 32 persen dari total anggaran taman nasional.
- Pada periode tersebut, taman nasional kawasan Papua, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, dan Sulawesi yang memiliki luas sekitar 10,7 juta hektar mendapatkan rata-rata sebesar 34 persen. Sisanya dialokasikan untuk taman nasional di kawasan Sumatera.

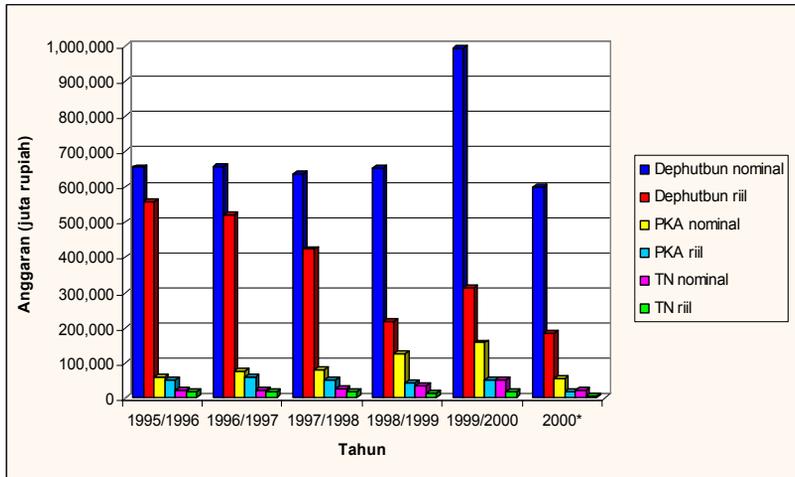
Anggaran Taman Nasional Berdasarkan Kawasan



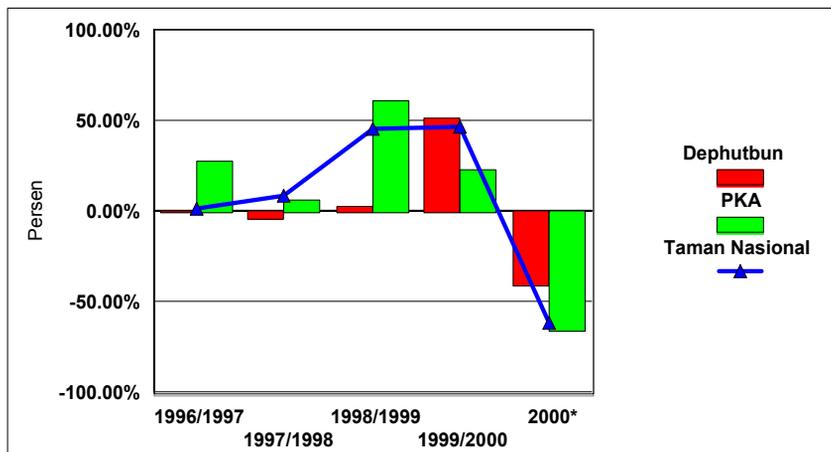
Dampak Krisis Ekonomi terhadap Anggaran Taman Nasional

- Kendatipun secara nominal total anggaran taman nasional mengalami peningkatan berarti, namun nilai riilnya mengalami penurunan hingga sangat drastis selama 98/99-2000.
- Ditjen PKA hanya mendapatkan alokasi rata-rata sebesar 13,5 persen selama 95/96-99/00 dari total anggaran Dephutbun. Secara riil, alokasi yang kurang proporsional ini semakin sulit dijadikan satu-satunya sumber pembiayaan.
- Taman nasional mendapatkan rata-rata 31,5 persen dari total anggaran Ditjen PKA selama 95/96-99/00. Kondisi ini menurunkan 'produktivitas' di lapangan.

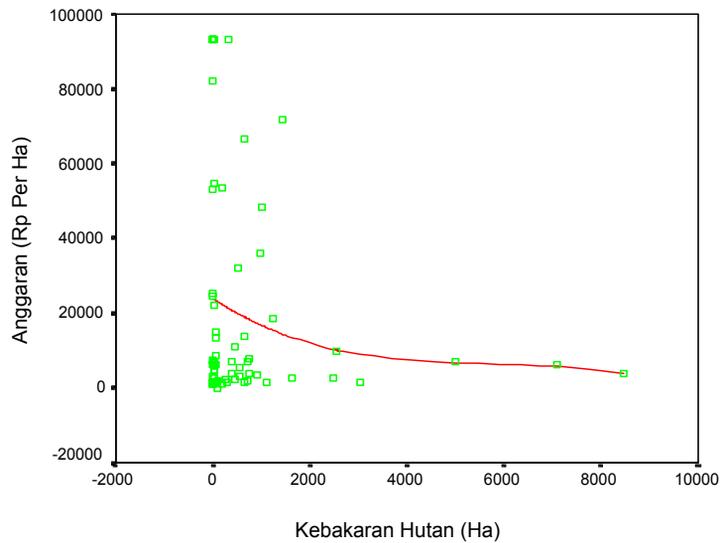
Dampak Krisis Ekonomi terhadap Anggaran (Jutaan Rupiah)



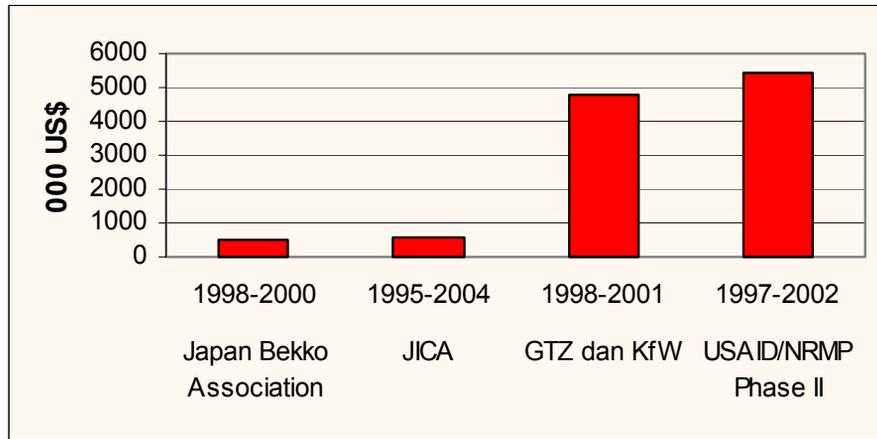
Dampak Krisis Ekonomi terhadap Pembiayaan Rupiah



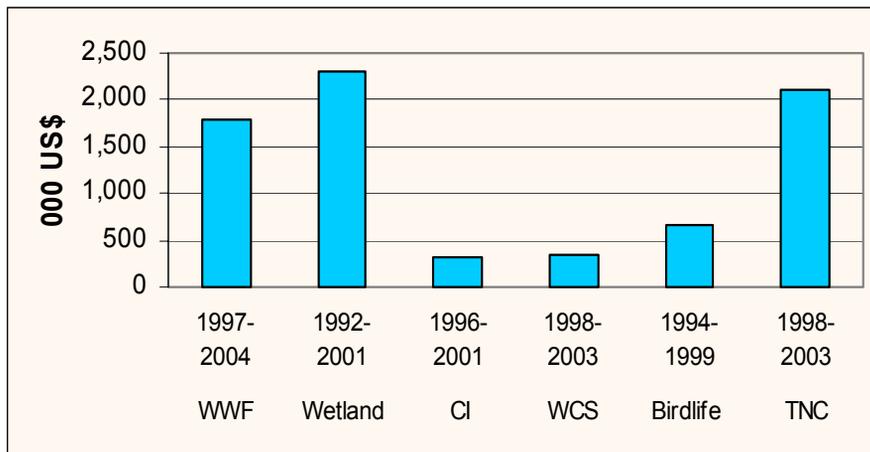
Hubungan Anggaran dan Ancaman: Kasus Kebakaran Hutan



Proyek Bilateral Ditjen PKA



Investasi Finansial LSM Internasional dan Nasional



Beberapa Pendekatan Inovatif untuk Penggalangan Dana Tambahan Taman Nasional dan Konservasi

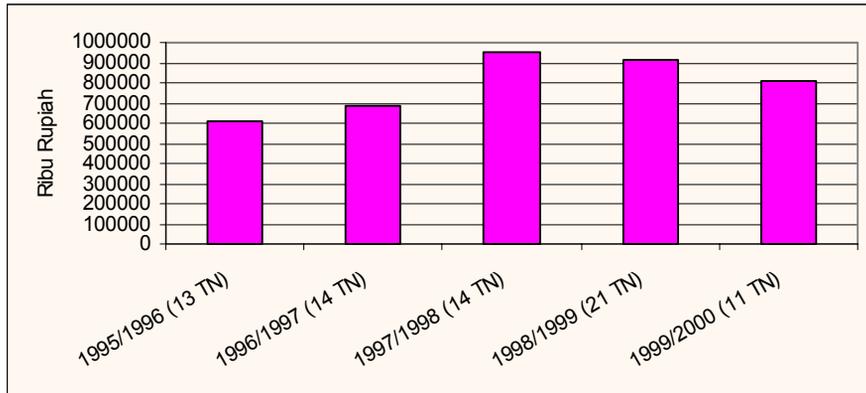
- **Pendekatan Domestik**
 - (1) **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**
 - (2) **Kemitraan**
- **Pendekatan Internasional**
 - (1) **Debt-for-Nature Swap**
 - (2) **Carbon Offset**
 - (3) **Trust Fund**

Pendekatan Domestik

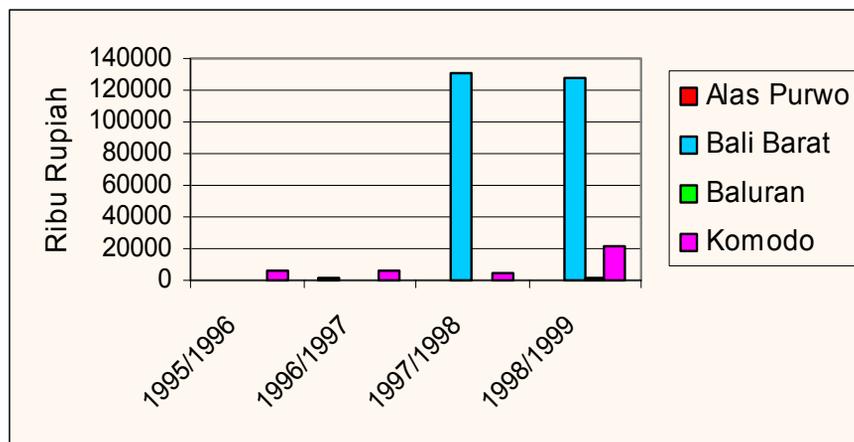
I. Penerimaan Negara Bukan Pajak

- **Sumber penerimaan dari pungutan masuk dan iuran/pungutan usaha pariwisata alam dari taman nasional masih kurang termobilisasi secara optimal.**
- **Selama 95/96-99/00, penerimaan dari tiket masuk dari 21 taman nasional dengan luas wilayah sekitar 5,2 juta hektar hanya menghasilkan sekita Rp 3,5 milyar.**
- **Penerimaan yang diperoleh dari pengurusan perizinan usaha pariwisata alam pada empat taman nasional dalam kurun waktu yang sama hanya mencapai Rp 304 juta.**
- **Beberapa pihak beranggapan bahwa salah satu kendala utama mobilisasi PNBP adalah pengaturannya sangat sentralistis (UU 20/97, PP 59/98, PP 73/99, UU 22/99, UU 25/99, PP 25/00).**

Penerimaan Pungutan Masuk Taman Nasional 1995/1996 – 1999/2000



Penerimaan PUPA Taman Nasional 1995/1996-1998/1999



II. Kemitraan

- **Bermitra dengan sektor swasta untuk mendukung pendanaan taman nasional, seperti Kemitraan Kutai (bukan contoh ideal).**
- **Salah satu persyaratan penting adalah swasta tidak menjadikan kemitraan tersebut sebagai justifikasi bagi mereka untuk merusak lingkungan**
- **Bermitra dengan masyarakat lokal dengan melibatkan mereka dalam upaya meningkatkan PNBP dari taman nasional seperti yang dilakukan di Taman Nasional Bunaken.**

Pendekatan Internasional

I. Debt-for-Nature Swap (DNS)

- **Utang luar negeri Indonesia saat ini mencapai sekitar US\$ 160 milyar**
- **Studi Kelayakan DNS di Indonesia memperlihatkan bahwa Indonesia cukup layak memanfaatkan fasilitas DNS**
- **DNS tidak mengurangi seluruh utang luar negeri Indonesia**
- **DNS bukan solusi krisis ekonomi Indonesia**
- **DNS dapat digunakan untuk memobilisasi dana tambahan konservasi sekaligus mengurangi 'secuil' utang (kasus Indonesia)**
- **Saat ini Indonesia sedang dipertimbangkan untuk mendapatkan dana DNS melalui fasilitas TFCA (*US Tropical Forest Conservation Act*)**

II. Carbon Offset

- Pendekatan ini didasarkan atas tuntutan global agar hutan-hutan tropis dapat digunakan sebagai penyerap karbon.
- Fungsi hutan tropis sebagai penyerap karbon digunakan oleh mekanisme ini untuk menggalang dana tambahan bagi pelestarian hutan dari para “carbon emitters” (*beneficiary pays principle*)
- Dana yang dihasilkan dari mekanisme ini digunakan di negara sasaran guna mendukung kegiatan pelestarian hutan, usaha-usaha reboisasi, dan mempromosikan sistem pemanenan secara lebih lestari dan tidak merusak.

III. Dana Abadi Taman Nasional Indonesia

- Dana Abadi bertugas menggalang dana dalam jumlah besar dan mengelola pendanaan konservasi untuk orientasi jangka panjang
- Dana Abadi mengelola dana melalui strategi investasi yang diarahkan untuk meningkatkan kontribusi pemerintah dan swasta
- Dana Abadi harus bekerja secara transparan, efektif, dan berorientasi kepada pelayanan
- Dana Abadi dirancang untuk mendukung pembiayaan jangka panjang dan menjamin keberlanjutannya

Tiga Kebutuhan Masa Akan Datang

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Tantangan Ditjen PHKA, ada tiga hal yang belum menjadi kebutuhan, yakni:

- **Kebutuhan akan desentralisasi dan dekonsentrasi tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada unit pengelola di daerah.**
- **Kebutuhan akan '*co-management approach*' dalam mendukung pengelolaan taman nasional. Pendekatan '*security*' masih diterapkan.**
- **Kebutuhan akan dana tambahan untuk mendukung kegiatan pengelolaan taman nasional.**